

POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PRA KEMERDEKAAN

Latifah Asnur^{1*}, Muhammad Kosim²

¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

latifahasnur@gmail.com,

muhammadkosim@uinib.ac.id

*¹E-mail Korespondensi: latifahasnur@gmail.com

Received: 05-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 12-06-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the educational policies implemented by the Dutch and Japanese colonial governments and their impacts on Islamic educational institutions in Indonesia before independence. This research employed a qualitative library research approach using historical and heuristic methods. Data were collected from books, scientific journals, historical documents, and other relevant literature. The findings reveal that Dutch educational policies tended to restrict the development of Islamic educational institutions through supervision, licensing regulations, and discriminatory educational systems. In contrast, Japanese policies provided greater opportunities for Islamic educational institutions to develop, although these policies were primarily intended to support Japanese political and military interests during World War II. Despite their different approaches, both colonial powers utilized education as an instrument of political control. The study concludes that colonial educational policies significantly influenced the development and transformation of Islamic educational institutions in Indonesia.

Keywords: Educational policy; Dutch colonialism; Japanese colonialism; Islamic education; Islamic educational institutions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang serta dampaknya terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen sejarah, dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial Belanda cenderung bersifat diskriminatif dan restriktif terhadap pendidikan Islam melalui berbagai regulasi, pengawasan, serta pembatasan aktivitas lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, pemerintah Jepang memberikan ruang yang relatif lebih luas bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam dengan memberikan dukungan terhadap pesantren, madrasah, dan organisasi-organisasi Islam, meskipun kebijakan tersebut tetap diarahkan untuk mendukung kepentingan politik dan militer Jepang selama Perang Asia Timur Raya. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua pemerintahan kolonial memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan dan mencapai tujuan politiknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial Belanda dan Jepang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perkembangan lembaga pendidikan Islam serta turut membentuk arah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa berikutnya. Penelitian ini penting dilakukan karena pendidikan Islam mengalami perubahan signifikan selama masa kolonial Belanda dan Jepang yang mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini memberikan pemahaman historis mengenai hubungan antara kebijakan kolonial dan transformasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan; kolonial Belanda; kolonial Jepang; pendidikan Islam; lembaga pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Sebelum masa kolonial, perkembangan pendidikan Islam di Nusantara berlangsung seiring dengan proses islamisasi yang melahirkan berbagai kerajaan Islam. Melalui surau, langgar, masjid, dan pesantren, pendidikan Islam berkembang sebagai lembaga yang berperan dalam pembentukan kehidupan sosial, keagamaan, dan intelektual masyarakat. Memasuki masa kolonial, keberadaan lembaga pendidikan Islam tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai kebijakan yang memengaruhi perkembangannya. Pendidikan Islam masa penjajahan terbagi menjadi dua bagian, pendidikan Islam masa kolonial Belanda dan masa Jepang (Susilo & Isbandiyah, 2018).

Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Neck pada tahun 1598, awalnya bermotifkan dagang, karena mereka kekurangan rempah-rempah, mereka berusaha mencari alternatifnya yaitu dengan mendatangi Indonesia dan kedatangan Belanda ke Nusantara karena pedagang Belanda dilarang berdagang dengan Portugis. Akibatnya, para saudagar Belanda terancam kehilangan mata pencaharian, namun ketika mereka berkuasa kebijakan mereka memberikan tekanan kepada umat Islam, terutama para ulama dan pesantren yang mereka bangun (Wahid, 2022).

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu yaitu kalangan bangsawan dan pejabat negara. Saat itu, masyarakat awam tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan karena dianggap tidak pantas. Akibatnya pendidikan di Indonesia tidak berhasil dan tidak merata. Banyak unsur diskriminatif dalam sistem pendidikan pada masa itu, dan sistem pendidikan didirikan semata-mata untuk kepentingan negara kolonial (Riska & Hudaidah, 2021).

Belanda juga meluncurkan misi keagamaan Kristen melalui pendidikan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, aktivitas keagamaan umat Islam selalu dikontrol dan dibatasi dengan ketat. Kebijakan kolonial di bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik pada umumnya. Sejak masa penjajahan Belanda membawa misi agama Kristen, maka dakwah dan pengajaran Islam, khususnya di sekolah, dipandang tidak sesuai dengan misi kolonialisme. Seperti pada jurnal oleh Muh. Amin mengatakan, pendidikan Islam masa pendudukan pemerintah kolonial Belanda sangat membatasi kegiatan madrasah dan guru yang mengajar di sana. Mereka melakukan ini sebab rasa takut terhadap ummat Islam yang sudah mulai berkembang (Amin, 2019) Belanda menciptakan kebijakan pendidikan Barat yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan Islam di Nusantara. Tidak hanya itu mereka melakukan berbagai kebijakan seperti ordonansi yang pada dasarnya ordonansi tersebut bermaksud sebagai sarana dominan pemerintah kolonial Belanda untuk mengontrol aktivitas para guru agama Islam.

Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat telah melarang perniagaan dan perdagangan minyak dengan Jepang atau yang dikenal dengan embargo. Hal ini dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan militer Jepang. Pada masa ini, Jepang sangat membutuhkan minyak untuk keperluan industri dan militer. Akibat terpuruknya perekonomian Jepang, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan pangannya. Karena sebagian besar makanan digunakan untuk memberi makan para prajurit di medan perang, menjadi sulit bagi pemerintah untuk mendistribusikan makanan kepada masyarakat (Ramadhani, 2021). Maka dari itu Jepang datang ke Nusantara dengan Keinginan Jepang untuk menguasai sumber daya alam dan hasil pertambangan. Keinginan tersebut terlihat pada pendudukan pertama Indonesia oleh Jepang, yaitu pendudukan wilayah-wilayah yang terdapat hasil pertambangan.

Masuknya Jepang ke Indonesia tidak dengan mudah atau langsung masuk tanpa perlawanan. Sebab pada saat itu KNIL (tentara Hindia Belanda) telah berusaha menghalangi masuknya Jepang ke Indonesia, tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil dikarenakan kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Setelah itu, satu persatu wilayah Indonesia berhasil diambil alih oleh Jepang. Setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang melalui penyerahan tanpa syarat yang ditandatangani oleh Jenderal Ter Poorten sebagai wakil Belanda dan Jenderal Imamura sebagai wakil Jepang (Aiwan & Rehani, 2022). Demikianlah Belanda meninggalkan Indonesia sejak itulah dimulai penjajahan Jepang di Indonesia.

Penyerahan kekuasaan Belanda kepada kekuasaan Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, lahirlah harapan dan cita-cita baru di kalangan masyarakat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan menjadi negara merdeka. Berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh Belanda selama menjajah, sementara Jepang terus melakukan propaganda untuk membangkitkan minat dan kepercayaan masyarakat Indonesia serta mempertahankan posisinya. Perubahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang membawa perubahan yang drastis. Hal ini terlihat dari banyaknya sistem yang diubah dan dihapuskan, seperti penghapusan sistem kelas (kasta) dan diskriminasi yang memperbolehkan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk bersekolah. Selain itu, Jepang telah merevisi dan memperkenalkan berbagai kebijakan dan peraturan. Untuk mengimbangi segala kebijakan dan perubahan pendidikan di Indonesia, Jepang mendirikan empat jenjang pendidikan bagi siswa dan beberapa jenis sekolah untuk guru di berbagai kota di Indonesia, serta Jepang juga memberikan bantuan ke sekolah-sekolah Islam atau pesantren (Ramadhani, 2021).

Sebelum kemerdekaan keadaan pendidikan islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolonial Belanda dan Jepang. Datangnya kedua negara ini mempengaruhi indonesia secara keseluruhan, kedatangan kedua negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Indonesia terutama pada pendidikan Islam di Indonesai. Seperti pada jurnal Amjad Aiwan, Rehani, Senja Maharanie, Hudaidah dan Eva Tri Cahyanti disimpulkan bahwa belanda Belanda mempunyai kebijakan kristenisasi dengan membangun sekolah mereka dan mempersulit proses sekolah islam dengan berbagai kebijakan perizinan pelaksanaan kegiatan pendidikan islam bahkan menutup sekolah yang tidak ada izin dan biaya dari pihak Belanda (Aiwan & Rehani, 2022b; Cahyanti, 2021; Maharanie, 2021). Namun kedatangan Jepang diterima oleh rakyat nusantara terutama masyarakat anti-belanda, Jepang berusaha untuk mengambil hati kaum muslim dengan membangun lembaga-lembaga islam, namun ternyata ada siasat lain dibalik itu semua seperti yang dikatakan oleh Mifathur Rohman pada jurnalnya (Rohman, 2018). Yoni Muslimin dalam jurnalnya, pemerintah Jepang sangat sedikit memberikan perhatian terhadap mutu pendidikan, tujuan pendidikan mereka adalah untuk menyediakan tenaga kerja cuma-cuma (Rhomusa) dan tentara untuk membantu kepentingan Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik. Karena itu membuat sekolah menekankan pendidikan militer. Pelajar diharuskan menjalani pelatihan fisik dan militer. Jepang berusaha membentuk kelompok propaganda yang misinya menanamkan ideologi baru yang akan menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Hal ini menyebabkan upaya pendidikan Jepang berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan (Muslimin & Hudaidah, 2021).

Berbagai penelitian telah membahas pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda maupun Jepang secara terpisah. Namun kajian yang secara khusus membandingkan kebijakan pendidikan

kedua pemerintahan kolonial tersebut serta dampaknya terhadap lembaga pendidikan Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komparatif kebijakan pendidikan kolonial Belanda dan Jepang serta implikasinya terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan kepustakaan (*Library Research*) sejarah. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya (Sari, n.d.). Adapun cara menganalisisnya dengan menggunakan teknik *heuristic*. *Heuristik* berasal dari kata Yunani *heuriskein*, artinya memperoleh. Dengan demikian *heuristik* adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan kebijakan Belanda dan Jepang terhadap pendidikan agama Islam baik di perpustakaan dan catalog (Wardah, 2014). Dalam hubungan penelitian, peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang merupakan jejak sejarah atau peristiwa sejarah. Studi kepustakaan (*Library Research*) dipilih sebagai teknik pengumpulan data dan informasi diperoleh berdasarkan bahan yang terdapat di perpustakaan berupa, arsip, dokumen, majalah, buku dan materi perpustakaan lainnya, dengan asumsi bahwa data yang diperlukan dalam pembahasan ini terdapat di dalamnya. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu, pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari karya ilmiah yang membahas tentang pesantren, pendidikan Islam dan kebijakan politik kolonialisme Belanda. Sedangkan bahan-bahan sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer adalah buku-buku yang berkaitan dengan reformasi pendidikan atau

artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen atau jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan metode sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas data. Interpretasi digunakan untuk memahami makna data sejarah, sedangkan historiografi dilakukan melalui penyusunan hasil penelitian secara sistematis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Belanda pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1596 di bawah komando Cornelis de Houtman, berhasil sampai di pelabuhan Banten, tetapi penduduk pesisir Banten yang mengusir kedatangan Belanda karena kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob van Neck pada tahun 1598. Awalnya motif Belanda datang ke Indonesia karena alasan bisnis, namun ketika berkuasa, kebijakannya memberikan tekanan kepada umat Islam khususnya para ulama dan pesantren yang mereka membangun. Belanda tak hanya ingin menguasai perdagangan, malah juga ingin menjajah Indonesia. Salah satu penyebab umum datangnya Belanda ke Indonesia untuk upaya meningkatkan aktivitas ekonomi dikarenakan adanya perang salib yang terjadi dan kota Konstantinopel dikuasai Turki yang menjadikan terganggunya hubungan perdagangan Eropa dengan dunia Timur sehingga menyebabkan Eropa kehabisan rempah-rempah. Karena Eropa kekurangan rempah-rempah, mereka berusaha mencari pasokan maka mendatangi Indonesia adalah alternatifnya dan kedatangan Belanda ke Nusantara karena pedagang Belanda dilarang berdagang dengan Portugis.

Akibatnya, para saudagar Belanda terancam kehilangan mata pencaharian (Wahid, 2022).

Pada saat datang ke Nusantara alasan spesifik mengapa orang Eropa (Barat) datang khususnya Belanda ke Indonesia setidaknya memiliki tiga tujuan: *Pertama*, tujuannya adalah menjadi kaya melalui keuntungan ekonomi. *Kedua*, untuk mempertahankan keuntungan ekonomi yang diperoleh, tujuan tersebut kemudian dapat dicapai melalui penguasaan politik, termasuk penguasaan terhadap wilayah Indonesia yang mereka kunjungi. Dan *ketiga*, menyebarkan agama yang dianutnya (Aiwan & Rehani, 2022). Belanda mengetahui bahwa mayoritas penduduk Nusantara beragama Islam, maka dari itu Belanda khawatir akan timbul gesekan atau pemberontakan dari kalangan Muslim fanatik.

Sebelum kolonial datang ke Nusantara praktik pelaksanaan pendidikan dilaksanakan di surau, langgar, mesjid dan pesantren tetap berjalan dengan semestinya. Namun setelah melihat kondisi tersebut (masyarakat Indonesia umat Islam yang fanatik), Belanda merasa ini adalah sebuah ancaman atau penghalang atau faktor penghambat bagi mereka, seperti ketentuan pada dokumen VOC yang menyatakan bahwa VOC harus berniaga dan bila perlu berperang, serta memperhatikan penyebaran agama islam dengan mendirikan sekolah-sekolah. Sejak itu maka pendidikan agama islam baik yang diselenggarakan di mesjid, musalla, pesantren dan madrasah dianggap tidak perlu dan tidak penting karena tidak ada kaitannya dengan kemajuan pembangunan, dan tidak membantu rencana awal Belanda. Mereka juga mengeluarkan kebijakan untuk membangun sekolah gereja yang dianggap perlu disetiap daerah keresidenan harus didirikan satu sekolah gereja, guna agar tidak adalagi yang tidak mampu membaca dan menulis tujuannya untuk dipekerjakan nantinya untuk kebutuhan Belanda. Padahal maksud Belanda mendirikan sekolah-sekolah tesebut karena

sekolah agama dianggap rendah dan tak akan mampu untuk bersaing dengan sekolah belanda sehingga mereka merasa nanti akan berhenti dengan sendirinya pendidikan agama islam tersebut, sampai-sampai mereka membuat sebuah badan atau kebijakan khusus yang mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam (Zaini, 2018).

Kebijakan-kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam diantaranya: *pertama*, Ordonansi I Guru yang berlaku sejak 2 November 1905, ordonansi ini diberlakukan untuk Jawa-Madura, kecuali Yogya dan Solo, isinya antara lain: Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati, Izin tersebut baru bisa diberikan bila guru agama tersebut mempunyai kualifikasi yang baik, dan pelajaran yang diberikan tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, guru agama harus mengisi daftar murid, dan harus menjelaskan pelajaran yang ia sampaikan, bupati dan instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu melanggar ketentuan yang berlaku, izin mengajar bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai kurang berkelakuan kurang baik.

Kedua, Ordonansi II kebijakan kali ini katanya lebih lunak dari yang pertama, namun pada prakteknya tetap saja memberatkan. Isinya : setiap guru agama harus menunjukkan bukti tanda terima pemberituannya, harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat berwenang, pengawasan dirasa perlu untuk memelihara ketertiban umum, bukti kelayakan bisa dicabut bila guru yang bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud mencari uang, guru agama bisa dihukum maksimum 8 hari kurungan atau denda maksimum f25, bila mengajar tanpa surat tanda terima laporan, tidak benar laporannya, atau lalai dalam mengisi daftar,

bisa dihukum maksimum sebulan kurungan atau denda maksimum f200, bila masih mengajar setelah dicabut haknya.

Pada dasarnya kedua ordonansi ini bermaksud sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi aktifitas para pengajar agama islam. *Ketiga*, Ordonansi Sekolah liar yang diberlakukan pada bulan Oktober 1923, isinya : Sekolah yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah tidak dibenarkan beraktifitas, dan hanya lulusan sekolah pemerintah ataupun sekolah swasta yang bersubsidi saja yang berhak mengajar. Secara konsep, ordonansi ini tidak berlaku untuk lembaga pendidikan islam, namun pada prakteknya sekolah-sekolah islam yang menanggung akibatnya, karena pendidikan islam yang notabane dikelola oleh pribumi tanpa ada campur tangan pemerintah Belanda dalam pembiayaannya-terancam ditutup. Karena pemerintah mempunyai kewenangan memberantas dan menutup madrasah serta sekolah yang tidak ada izinya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah Belanda. Pada tahun 1932 keluar peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang di sebut dengan Ordonansi Sekolah Liar {*Wilde School Ordonantie*} (Sumanti, 2018).

Belanda yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia namun juga melakukan campur tangan politik. Politik mengacu pada semua kegiatan atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan suatu struktur sosial. Kebijakan Belanda menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap penduduk wilayah jajahan tersebut, dengan memberikan tekanan kehidupan beragama Islam (Sarnoto, 2012). Ini dikarenakan Belanda ingin memperkenalkan misi agama Kristen melalui pendidikan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, aktivitas

keagamaan umat Islam selalu dikontrol dan dibatasi dengan ketat. Kebijakan kolonial di bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik pada umumnya. Sejak masa penjajahan Belanda membawa misi agama Kristen, maka dakwah dan pengajaran Islam, khususnya di sekolah, dipandang tidak pas dengan misi kolonialisme. Perkembangan Islam dapat menjadi ancaman bagi penjajah Belanda yang mengembangkan misi kolonialnya karena alasan politik, ekonomi, dan agama. Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk memisahkan sekolah dari ajaran agama Islam (Hamami, 2004).

Pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan politik di Belanda yang sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia. Perubahan politik ini memberikan dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat sebagai kewajiban moral pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat adat. Pada tahun 1899, Van Deventer, seorang warga negara Belanda, menerbitkan artikel berjudul “Utang Kehormatan” (Een Eereschuld) di majalah *De Gids*, yang memuat keprihatinan para intelektual Belanda terhadap pengaruh kapitalisme dalam memanusikan Hindia Belanda. Terbitnya artikel ini memicu perubahan yang sangat drastis dalam kebijakan pemerintah Belanda terhadap penduduk kolonial Hindia Belanda, yaitu kebijakan etis atau kebijakan balas dendam resmi Ratu Belanda pada tahun 1901. Pada akhir abad ke-19 ini Snouck Hurgronje seorang sarjana Belanda bidang budaya Oriental dan bahasa serta Penasehat Urusan Pribumi untuk pemerintahan kolonial Belanda, merasa optimis dan meramalkan bahwa Islam akan dikalahkan oleh dominasi pendidikan Barat, dengan tawaran kemajuan dan peningkatan standar pribumi yang cukup menarik (Galih, 2017).

Melalui Politik Etis pribumi sudah mulai bersentuhan dengan pendidikan. Pendidikan yang diperkenalkan oleh

pemerintah, tentu saja pendidikan ala barat yang berbeda dengan adat istiadat masyarakat pribumi. Oleh karena itu, pendidikan ala barat disesuaikan dengan budaya masyarakat, misalkan pemakaian bahasa daerah seperti bahasa Sunda dan bahasa Jawa tidak dengan bahasa Belanda. Beberapa Sekolah yang berkembang pada zaman periode etis, tabel berikut (Fakhriansyah & Patoni, 2019) :

Tabel 1: Jenis Sekolah pada zaman periode etis

Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Lama Belajar	Peruntukan
Sekolah Rendah	ELS (<i>Europese Lagere School</i>)	7 tahun	Anak keturunan Eropa , timur asing, atau pribumi dari tokoh terkemuka
	HCS (<i>Hollands Chinese school</i>)	7 tahun	Anak-anak keturunan timur asing, khususnya keturunan Cina
	HIS (<i>Hollands Inlandse School</i>)	7 tahun	Anak-anak khusus pribumi Sekolah Lanjutan Menengah
Sekolah Lanjutan Menengah	MULO (<i>Meer Uitgebreid Lager Onderwijs</i>)	3 tahun	Anak pribumi dan timur asing
	HBS (<i>Hogere Burgerschool</i>)	3 tahun	Golongan Eropa, bangsawan pribumi
	AMS (<i>Algemene Middelbare School</i>)	3 tahun	Anak pribumi dan timur asing

Dilihat dari penerapan politik etis, sekilas dapat dibilang bahwa Belanda telah melaksanakan reformasi di beberapa hal, termasuk pendidikan. Namun yang mereka sebut reformasi pendidikan adalah *Westernisasi* dan *Kristenisasi*, terutama untuk kepentingan Barat dan Kristen. Kedua motif ini mewarnai kebijakan kolonial Barat di Indonesia selama tiga setengah abad. Dalam konteks berbagai kebijakan tersebut, kebijakan politik erat

kaitan dengan mereka pada umumnya, yaitu kebijakan yang dikendalikan oleh kelompok dominan dan tidak etis yang bertujuan untuk mendorong kematangan politik dan kemandirian daerah jajahan (Sukmurdianto & Zulfa, 2020).

Kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah yang diskriminatif sebagaimana telah dibahas berdampak pada timbulnya ketidakpuasan bagi beberapa kalangan bumiputra dan mampu membangkitkan gairah para tokoh untuk menyadari bahwa pendidikan sanga penting, terutama dari kalangan pendidikan agama. Sehingga sebagaimana dicatat oleh Tjandrasasmita muncul gerakan pendidikan dan sosial. Sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan Islam muncul. Sekolah-sekolah itu didirikan oleh para ulama, seperti Syekh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Haji Abdullah Ahmad di Minangkabau. Sementara itu, di Jawa muncul juga sekolah-sekolah berbasis keagamaan Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU juga mengembangkan lembaga pendidikan Islam berbentuk pesantren dan madrasah (Untung, 2013).

Pendirian lembaga pendidikan berbasis Islam merupakan upaya untuk mengantisipasi perkembangan sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, di sisi lain sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya gerakan politik Indonesia. Para pendidik muslim memahami betapa pentingnya pendidikan (agama) bagi perkembangan generasi muda. Mereka khawatir pengaruh dan pemikiran ulama Islam akan hilang pada generasi muda dengan berdirinya sekolah-sekolah kolonial Belanda yang secara resmi mengambil sikap netral terhadap agama (Mubin & Aziz, 2020).

Menurut Samsul Nizar dalam jurnal pendidikan islam dalam penjajahan Belanda dan jepang oleh Amin mengatakan,

kebijakan yang diambil pemerintah Belanda terhadap penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam didasari oleh rasa takut, rasa akan panggilan agama khususnya Kristen, dan rasa akan kolonialisme. Dengan cara ini mereka menerapkan peraturan dan kebijakan sebagai berikut: *Pertama* pada tahun 1882 M, pemerintah Belanda membentuk badan khusus yang mengawasi kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam yang diberi nama “*Priestterraden*” atas saran penguasa tersebut, pada tahun 1905 M, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa siapa pun yang berdakwah harus terlebih dahulu meminta izin.

Kedua, kemudia pada tahun 1925 M, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi mengenai pendidikan Islam, yaitu tidak semua orang (kyai) dapat memberikan pengajaran. Peraturan ini diterapkan karena semakin berkembangnya organisasi-organisasi pendidikan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam (PSI), Al-Irsyad dan lain-lain. *Ketiga*, pada tahun 1932 M, dikeluarkan peraturan untuk menghapuskan dan menutup sekolah-sekolah yang tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan atau menawarkan kelas-kelas yang tidak disukai pemerintah Belanda, yang disebut dengan Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie). Peraturan tersebut diundangkan setelah bangkitnya gerakan nasionalis Islam pada tahun 1928 M, yaitu berupa Sumpah Pemuda (Amin, 2019).

Pendidikan pada masa penjajahan sungguh bertujuan untuk kepentingan sang penjajah. Dalam hal ini, Belanda, sebagai negara penjajah di Indonesia, memiliki kemampuan untuk membangun hegemoni dan menjajah lebih lama. Oleh karena itu, Belanda menggunakan konteks pendidikan sebagai cara untuk mengukuhkan kekuasaannya dengan membuat alat birokrasinya tersedia untuk semua siswa, baik pribumi maupun non-pribumi.

Tetapi secara tidak langsung pengaruh kebijakan politik etis terutama bidang pendidikan memberikan dampak positif bagi hadirnya para kaum pendidik dan pergerakan Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan memunculkan beberapa tokoh seperti Raden Tirtoadisoeryo yang mendirikan Sarekat Islam, organisasi Budi Utomo yang memiliki kepedulian terhadap para pelajar dan intelektual, organisasi Muhammadiyah yang mencanangkan diri sebagai organisasi social keagamaan dan menghindari gerakan politik. Melalui organisasi pendidikan pertama kali yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Taman Siswa, pendidikan nasional mulai menemukan jati dirinya sebagai bentuk pendidikan yang diorientasikan pada manusia sejati, manusia merdeka, berkaitan dengan soal budaya, bahasa, adat istiadat, moral, baca tulis, menghitung, dan lainnya (Syaharuddin & Susanto, 2019).

Jadi dapat disimpulkan sikap pemerintah Belanda tersebut setidaknya dapat digolongkan sebagai: (1) pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan Belanda. (2) pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk melatih tenaga kerja murah untuk membantu pada kepentingan Belanda. (3) pendidikan diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan misi Kristen dan mengubah penduduk asli menjadi Kristen. (4) pendidikan diberikan dengan tujuan melestarikan dan melanggengkan perbedaan sosial. Dapat kita melihat bahwa kebijakan pemerintah Belanda dalam menyelenggarakan program pendidikan adalah untuk kepentingan mereka sendiri.

Jepang

Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat telah melarang perniagaan dan perdagangan minyak dengan Jepang atau yang dikenal dengan embargo. Artinya hal ini dimaksudkan

untuk melemahkan kekuatan militer Jepang. Selama ini Jepang sangat membutuhkan minyak untuk keperluan industri dan militer. Perekonomian Jepang yang terpuruk membuat masyarakatnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Karena sebagian besar makanan digunakan sebagai perbekalan tentara di medan perang, distribusi makanan pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat. Pada akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang mengebom Pearl Harbor pangkalan Angkatan Laut AS terbesar di Pasifik. Setelah serangan yang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat tersebut, pecahlah Perang Pasifik. Selain pangkalan angkatan laut Amerika, serangan Jepang juga menargetkan Filipina dan kemudian Indonesia untuk merebut cadangan logistik dan bahan perang industri seperti minyak, timah, dan aluminium. Memang pada masa Perang Pasifik, cadangan minyak Indonesia diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan Jepang (Ramadhani, 2021).

Bulan Februari 1942, Jepang mulai menyerang pulau Jawa, pusat administrasi Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang, aliansi yang terdiri dari Belanda, AS, Inggris, dan Australia membentuk Komando Gabungan ABDACOM, yaitu *American-British-Dutch-Australian Command* yang bermarkas di Lembang. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa, meliputi tiga lokasi berbeda: Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. Pendaratan Jepang merupakan kejutan bagi Belanda sehingga Jepang dengan cepat menyerbu pusat kekuasaan Belanda. Selain itu, pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia, pusat pemerintahan Belanda, jatuh ke tangan Jepang dan disusul kota-kota lain yang dengan mudah diambil alih oleh Jepang tanpa perlawanan apa pun. Akhirnya, tiga hari setelah kota Batavia jatuh ke tangan Jepang atau lebih tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang melalui

penyerahan tanpa syarat yang ditandatangani oleh Jenderal Ter Poorten sebagai wakil Belanda dan Jenderal Imamura sebagai wakil Jepang (Aiwan & Rehani, 2022)

Kedatangan Jepang ke Nusantara disambut dengan terbuka dan gembira oleh rakyat Indonesia, karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu pemerintahan Hindia-Belanda selama ini. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa semangat kemerdekaan dan pembebasan dari pemerintahan kolonial Belanda. Kedatangan Jepang dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam penentang anti-Belanda. Rakyat di kebanyakan daerah di Jawa menyambut pasukan-pasukan Jepang dengan suka cita dengan mengibarkan bendera Jepang dan Indonesia. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan Jepang untuk menarik simpatik rakyat Indonesia (Ridlo, 2022).

Pada babak pertamanya pemerinta Jepang menampilkan diri seakan-akan membela islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia II. Berbeda dengan kebijakan Belanda yang tidak membantu membiayai pendidikan masyarakat, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan uang bagi sekolah, pesantren dan madrasah, sehingga bebas menyelenggarakan pendidikan sesuai target kurikulum seperti menyediakan buku-buku pelajaran, dana yang diberikan dan diperuntukkan untuk pengadaan buku-buku dan literatur sebagai sarana utama dalam pembenahan kurikulum pendidikan, untuk mendekati umat Islam mereka menempuh beberapa kebijakan, diantaranya ialah: (1) Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada pada zaman belanda disebut kantor *Voor Islamistische Zaken* yang dipimpin oleh orang-orang orientalis belanda, diubah oleh jepang menjadi kantor *Sumubi* yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari. (2) Para ulama islam bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan orientalisizinkan membentuk barisan pembela tanah air (PETA). (3) Umat islam diizinkan

meneruskan organisasi persatuan yang disebut majelis islam a'la indonesia (MIAI) yang bersifat kemasrayarakatan. Namun pada bulan oktober 1943 MIAI di bubarkan dan diganti dengan majelis sura muslimin indonesia (MASYUMI) dan Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. (4) Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. (5) Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan hizbullah untuk memberikan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam, barisan ini dipimpin oleh K.H. Zainal Arifin. (6) Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta (Hasnida, 2017).

Meskipun singkat, berlangsung pada tahun 1942-1945, masa pendudukan Jepang memberikan corak yang berarti pada pendidikan di Indonesia. Tidak lama setelah berkuasa, Jepang segera menghapus sistem pendidikan warisan Belanda yang didasarkan atas penggolongan menurut ras, kebangsaan, dan status sosial dan membangun sekolah rakyat (SR) yang dalam bahasa Jepang disebut *Kokumin Gakko*. Sekolah ini terbuka untuk semua golongan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan asal-usulnya. Pada masa pendudukan Jepang, ada satu hal istimewa dalam pendidikan yaitu sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegerikan meskipun sekolah-sekolah swasta lain, seperti Muhammadiyah, Taman Siswa dan lainlain diizinkan terus berkembang dengan pengaturan dan penyelenggaraan oleh pendudukan Jepang.

Di sisi lain, madrasah-madrasah dibangun dengan gencar selagi ada angin segar yang diberikan oleh Jepang. Walaupun lebih bersifat politis belaka, kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja dan umat Islam Indonesia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ini tampak di Sumatera dengan berdirinya

madrasah Awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi. Hampir seluruh pelosok perdesaan dapat ditemukan Madrasah Awaliyah yang dikunjungi banyak anak-anak laki-laki dan perempuan. Madrasah Awaliyah ini diadakan pada sore hari dengan waktu kurang satu setengah jam. Materi yang diajarkan ialah membaca Alquran, ibadah, akhlak dan keimanan sebagai pelatihan pelajaran agama yang dilakukan di sekolah rakyat pagi hari. Jika dilihat dari sisi pendidikan zaman Jepang, umat Islam mempunyai banyak peluang untuk memajukan pendidikan Islam, sehingga tanpa orang Jepang tidak menyadarinya untuk menjadikan umat Islam mempunyai cukup potensi kemampuan untuk maju dalam bidang pendidikan atau melawan penjajah (Ramayulis, 2012).

Disisi lain Jepang menerapkan politik penyeragaman sekolah bagi seluruh penduduk Indonesia baik dari golongan atas (Bangsawan dan sejenisnya) maupun dari golongan bawah (Rakyat jelata). Mereka mempunyai kesempatan menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang sama. Pada masa pendudukan Jepang banyak terjadi perubahan dalam sistem pendidikan, Beberapa perubahan mendasar tersebut adalah sebagai berikut (Rohman, 2018):

Tabel 2: Sistem Pendidikan Zaman Jepang

Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Lama Belajar	Ket
Sekolah Dasar	Sekolah Rakyat (<i>Kekumin Gakko</i>)	6 tahun	terbuka bagi semua golongan penduduk tanpa diskriminasi status sosial. Sekolah ini ada disemua desa atau kota atau semua tempat yang dulu ada sekolah dasar.
	Sekolah Lanjutan Pertama (Shoto)	3 tahun	terbuka bagi semua golongan penduduk yang memiliki Ijazah SR.

Politik Pendidikan Kolonial Belanda dan Jepang Terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Pra Kemerdekaan-Latifah Asnur, Muhammad Kosim

Jenis Sekolah	Nama Sekolah	Lama Belajar	Ket
	Chu Gakko) atau sekarang SMP		
	Sekolah Kejuruan	3 tahun	Sekolah Pertukangan (<i>Kogyo Gakko</i>), Sekolah Pertanian (<i>Nogyo Gakko</i>) dan Sekolah Pelayaran.
Sekolah Lanjutan Menengah	Sekolah lanjutan umum tingkat atas (Kota Chu Gakko) Jenjang Sekolah Tinggi	3 tahun	terbuka bagi semua golongan penduduk tanpa diskriminasi status sosial. tingkat ini hampir seluruh sekolah tinggi ditutup. Kecuali, Sekolah Kedokteran Tinggi (<i>Ika Dai Gakko</i>) di Jakarta, Sekolah Obat (<i>Yaku Gakko</i>) di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi (<i>Sika Gakko</i>) di Surabaya, Sekolah Teknik Tinggi (<i>Kagyo Dai Dakko</i>) yang dibuka tahun 1944 di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, Akademi pemerintahan (<i>Kenkoku Gakko In</i>) yang dibuka pada awal tahun 1945 di Jakarta sebagai ganti MOSVIA pada masa Belanda

Tetapi tetap tentu tetap ada aspek negatif dari kebijakan Jepang. Kedatangan Jepang jelas bertujuan imperialis untuk menguras kekayaan Indonesia. Jepang menindas penduduk pribumi dengan sistem kerja paksa (*romusa*). Sebagian dari tujuan pendidikan pada zaman penjajahan jepang ialah untuk memenuhi tanaga cuma-cuma (*romusha*) dan memproduksi prajurit-prajurit

untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Berdampak pada dunia pendidikan juga terbengkalai karena para pelajar disuruh gerak badan, baris berbarik, bekerja bakti dan bernyanyi sehingga itu pelajar-pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi (Ramayulis, 2012). Tidak hanya itu kebijakan pemerintah Jepang yang terlalu berlebihan dalam memerintahkan penghormatan terhadap kaisar Jepang juga bukan merupakan kebijakan populis yang disukai oleh umat Islam. Bagaimanapun, cara menghormat dengan membungkukkan badan kepada istana kaisar seperti yang dipraktekkan dalam sikap *Sei Kerei* dinilai melukai keyakinan teologis umat Islam yang hanya memperkenankan sikap serupa ditujukan kepada Tuhan dalam sholat. Selain itu, kebijakan Jepang agar supaya guru-guru mengajarkan dan menanamkan budaya Jepang dalam aktivitas pendidikannya sebagai kewajiban rutin juga dinilai sebagai upaya untuk mengasingkan anak didik dari akar budayanya sendiri, budaya Indonesia. Dua kebijakan tersebut telah menimbulkan sikap resisten dan penolakan kalangan Islam untuk melaksanakannya sesuai dengan perintah Jepang (Syarif, 2019).

Kebijakan lain yang Jepang terapkan adalah kebijakan berbahasa, bahasa Belanda dilarang digunakan sama sekali baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Selama masa pendudukan Jepang inilah bahasa Indonesia berkembang dan dimodernkan sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah. Pada masaa ini nasionalisme tumbuh dengan sempurna, masyarakat pedesaan dan dan masyarakat kecil yang sejak awal tidak mendapatkan pendidikan barat Belanda, memiliki peluang untuk meningkatkan diri dalam kemampuan penggunaan bahasa Indonesia. Mereka bersemangat

mempelajari bahasa Indonesia, yang harus mereka pahami sejak dari sekolah rendah sampai sekolah menengah (Rohman, 2018).

Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang erat kaitannya dengan kebutuhan bersama antara Jepang dan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam Indonesia dalam perang di Asia Timur Raya, sehingga Jepang dapat menerima bantuan dari umat Islam Indonesia. Sedangkan umat Islam berharap Indonesia memperoleh kemerdekaan. Di hadapan para ulama, Letnan Jenderal Imamura, seorang pejabat militer Jepang di Pulau Jawa, berpidato yang menegaskan keinginan masyarakat Jepang untuk melindungi dan menghormati Islam. Politik Jepang secara umum tentunya juga mempengaruhi kebijakan terkait pendidikan Islam di Indonesia, peraturan tentang pendidikan agama juga diterapkan pada masa penjajahan Jepang. Meski pada hakikatnya pengaturan ini juga bertujuan untuk memantau lembaga-lembaga pendidikan Islam di masyarakat, namun Jepang tampak lebih toleran atau lebih lunak dibandingkan pemerintah kolonial Belanda. Mungkin karena keberadaan mereka di Indonesia yang masih muda, maka dari itu mereka merasa perlu untuk merebut hati umat Islam. Jepang bahkan menawarkan dukungan finansial kepada sekolah-sekolah tersebut, sekaligus mengizinkan masyarakat untuk membuka kembali sekolah-sekolah yang ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda. Jepang awalnya memprioritaskan umat Islam Indonesia dalam mengembangkan pendidikan Islam, khususnya penyebaran Islam. Begitulah strategi yang diterapkan Jepang pada Perang Dunia II, terbukti setelah Jepang mendapat tekanan dari sekutu Jepang membuktikan dirinya ternyata menjadi penjajah yang lebih kejam dibandingkan Belanda. Masyarakat terpaksa bergabung dengan badan pertahanan Jepang, sehingga pendidikan masyarakat terpengkalai. Namun di bawah penindasan Jepang, masih terdapat madrasah yang mampu beroperasi di lingkungan

pesantren, yang berada di luar jangkauan Jepang karena seringkali pesantren berlokasi di daerah terpencil (Rama & Rasyid, 2022).

Dapat disimpulkan dunia pendidikan pada masa Jepang terbengkalai sebab para pelajar di sekolah tiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain sebagainya, guna dilatih fisik untuk perang militer, tetapi hal ini juga menjadi pegangan pengalaman serta latihan bagi masyarakat. Meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh seperti yang sudah dijelaskan diatas, sisi beruntungnya madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang, pengajaran di pesantren masih bisa berlangsung normal, diperbolehkan pembelajaran pendidikan agama Islam, adanya perguruan tinggi, siapapun berhak menerima pendidikan.

Dengan begitu kebijakan pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan masa penjajahan Belanda yang bersifat diskriminatif, sementara pada masa Jepang konsep diskriminasi tidak ada tetapi terjadi penurunan kualitas secara drastis baik dari sisi keilmuan maupun mutu murid dan guru. Kondisi ini tidak terlepas dari target pemerintah Jepang melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan memelopori dan mewujudkan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang diimpikan Jepang.

Tabel 3: Analisis Komparatif Kebijakan Pendidikan Kolonial Belanda dan Jepang

Aspek	Belanda	Jepang
Tujuan Pendidikan Islam	Kontrol kolonial Dibatasi	Mobilisasi perang Diakomodasi terbatas

Aspek	Belanda	Jepang
Madrasah	Diawasi	Didukung
Organisasi Islam	Dibatasi	Dimanfaatkan
Dampak	Restriktif	Pragmatis

SIMPULAN

Kebijakan pendidikan kolonial Belanda dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengelola pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang cenderung restriktif melalui berbagai regulasi, pengawasan, dan pembatasan terhadap aktivitas pendidikan Islam. Kebijakan seperti Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar digunakan untuk mengontrol perkembangan madrasah, pesantren, serta para guru agama. Di sisi lain, pemerintah Jepang memberikan ruang yang relatif lebih luas bagi perkembangan pendidikan Islam dengan memberikan dukungan terhadap madrasah, pesantren, dan organisasi-organisasi Islam. Namun, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya bertujuan untuk memajukan pendidikan Islam, melainkan sebagai strategi politik untuk memperoleh dukungan umat Islam dalam mendukung kepentingan perang dan kekuasaan Jepang di Indonesia.

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun Belanda dan Jepang menerapkan kebijakan yang berbeda, keduanya menjadikan pendidikan sebagai instrumen politik kolonial. Belanda menggunakan pendekatan pengawasan dan pembatasan untuk mempertahankan dominasi kolonial, sedangkan Jepang menggunakan pendekatan akomodatif dan pragmatis untuk memperoleh legitimasi serta dukungan masyarakat Muslim. Perbedaan strategi tersebut memberikan dampak yang berbeda terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam, baik dalam

bentuk pembatasan maupun pemberian ruang pengembangan yang bersifat sementara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial Belanda dan Jepang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan pada masa kolonial turut membentuk proses transformasi pendidikan Islam, mendorong lahirnya berbagai bentuk adaptasi, perlawanan, dan pembaruan yang kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia pada masa pascakemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Nusantara sebelum kemerdekaan: Kasus kebijakan politik kolonial Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 12037–12045. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10365>

Amin, M. (2019). Pendidikan Islam masa penjajahan Belanda dan Jepang. *Pilar*, 10(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5021>

Cahyanti, E. T. (2021). Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Masa kolonial hingga masa reformasi. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 181–197.

Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses pendidikan bagi pribumi pada periode etis (1901–1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 122–147.

Galih, D. R. (2017). Penerapan politik etis di Surabaya tahun 1911–1930. *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3).

Hamami, T. (2004). Pendidikan agama Islam di sekolah umum sebagai keharusan sejarah. *Jurnal PAI*, 1(2). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8665/>

Hasnida, H. (2017). Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa pra kolonialisme dan masa kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). *Kordinat*, 16(2), 237–256.

Maharani, S. (2021). Dinamika pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 1(2). <https://doi.org/10.30659/jp-sa.v1i2.15516>

Mubin, F., & Aziz, A. (2020). Politik pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan pesantren terhadap hegemoni pendidikan Barat era kolonialisme Belanda. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 123–136.

Muslimin, Y., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 1(3), 130–134.

Rama, B., & Rasyid, M. R. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia zaman penjajahan Belanda dan Jepang. *Pijar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 102–109.

Ramadhani, S. (2021). Sejarah perkembangan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 8(1), 10–23.

Ramayulis. (2012). *Sejarah pendidikan Islam* (1st ed.). Kalam Mulia.

Ridlo, R. (2022). Transformasi kebijakan madrasah dari Nizham al-Mulk sampai masa awal kemerdekaan Indonesia. *Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 21–33.

Riska, R., & Hudaidah, H. (2021). Sistem pendidikan di Indonesia pada masa Portugis dan Belanda. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 824–829.

Rohman, M. (2018). *Kebijakan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang*. <https://osf.io/ack3p/download>

Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6, 41–53.

Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild*, 1(1). <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/540/>

Sukmurdiyanto, S., & Zulfa, M. Y. (2020). Kebijakan pendidikan Islam di Nusantara sebelum kemerdekaan: Kasus kebijakan politik kolonial Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *Mau'izhah*, 10(2), 143–164.

Sumanti, S. T. (2018). Analisis kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(1), 44–62.

Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik etis dan pengaruhnya bagi lahirnya pergerakan bangsa Indonesia. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403–416.

Syahrudin, & Susanto, H. (2019). *Sejarah pendidikan Indonesia: Era kolonialisme Nusantara sampai reformasi*. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

Syarif, M. (2019). Politik pendidikan Jepang dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(2), 247–266.

Untung, M. S. (2013). Kebijakan penguasa kolonial Belanda terhadap pendidikan pesantren. *Forum Tarbiyah*, 11(1), 3–17.

Wahid, A. (2022). Eksistensi dan kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4613–4623.

Wardah, E. S. (2014). Metode penelitian sejarah. *Tsaqofah*, 12(2), 163–175.

Zaini, D. (2018). *Sejarah pendidikan Islam: Signifikansi jejak pendidikan Islam bagi pengembangan pendidikan Islam masa kini dan masa depan*. Widia Puspita.